

**AFILIASI:**

^{1,2,3}Akuntansi Sektor Publik,
Jurusan Akuntansi, Politeknik
Negeri Sriwijaya

***KORESPONDENSI:**

rynaagstna19@gmail.com

THIS ARTICLE IS AVAILABLE IN:

<https://e-journal.umc.ac.id/index.php/JPK>

DOI: [10.32534/jpk.v12i3.7737](https://doi.org/10.32534/jpk.v12i3.7737)

CITATION:

Agustina, R., Armaini, R., & Indriasari, D. (2025). Pengaruh Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *Jurnal Proaksi*, 12(3), 520–537.

<https://doi.org/10.32534/jpk.v12i3.7737>

Riwayat Artikel:**Artikel Masuk:**

8 Juli 2025

Di Review:

30 Juli 2025

Diterima:

16 September 2025

Pengaruh Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Ryna Agustina ^{1*}, Rosy Armaini ², Desi Indriasari ³

Abstrak

Tujuan Utama - Tujuan penelitian ini mengetahui dan melihat pengaruh transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap Pengelolaan APBDes.

Metode - Populasi pada penelitian ini sebanyak 15 desa di Kecamatan Indralaya Utara. Sampel terdiri dari 90 responden yang dipilih menggunakan teknik sampling jenuh dan menggunakan data primer melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM).

Temuan Utama - Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa seluruh variabel independen yaitu transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan, terhadap Pengelolaan APBDes. Semakin tinggi transparansi dan juga partisipasi semakin baik Pengelolaan APBDes. Hal ini menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan desa yang terbuka dan melibatkan masyarakat secara aktif.

Implikasi Teori dan Kebijakan – Implikasi dari penelitian ini yaitu sebagai bahan pertimbangan dan rujukan untuk pemerintah desa dalam memperbaiki sistem pengelolaan dana desa agar lebih terbuka dan melibatkan masyarakat.

Kebaruan Penelitian - Penelitian ini menggunakan PLS-SEM, yang memungkinkan analisis yang lebih kompleks dan mendalam terhadap hasil penelitian tetapi juga menambah pemahaman tentang bagaimana Transparansi dan Partisipasi Masyarakat secara bersama mempengaruhi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kata Kunci: Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Tata Kelola Desa, Akuntabilitas

Abstract

Main Purpose - The purpose of this study is to find out and see the influence of transparency and community participation on the Management of the APBDes.

Method - The population of this study is 15 villages in North Indralaya District. The sample consisted of 90 respondents who were selected using saturated sampling techniques and using primary data through questionnaires and analyzed using Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM).

Main Findings - The results of this study state that all independent variables, namely transparency and community participation, have a positive and significant effect on the Management of the APBDes. The higher the transparency and also community participation, the better the Management of the APBDes. This emphasizes the importance of open village governance and actively involving the community.

Theory and Practical Implications - The implications of this research are considered and referenced for village governments in improving the village fund management system to be more open and involve the community.

Novelty - This study uses PLS-SEM, which allows for a more complex and in-depth analysis of the research results but also adds to the understanding of how Transparency and Community Participation collectively affect the Management of Village Revenue and Expenditure Budgets.

Keywords: Transparency, Community Participation, Village Revenue and Expenditure Budget Management, Village Governance, Accountability

PENDAHULUAN

Desa merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan Indonesia yang memiliki otonomi mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya. Hal ini ditegaskan dalam [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa](#), menyatakan desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, desa memiliki tanggung jawab strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pembangunan, terutama pengelolaan keuangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ([Indrianasari, 2017](#)). Namun, kelemahan tata kelola dan lemahnya integritas pengelolaan dana desa menjadi masalah nyata yang menyebar luas dan berulang kali terjadi di banyak wilayah, sehingga perlu segera menjadi perhatian utama. Hal ini menandakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan wajib dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Krisis integritas pengelolaan dana desa menjadi masalah yang menyebar luas dan terjadi secara berulang di berbagai daerah yang mendesak untuk ditangani, karena alokasi dana yang besar sering tidak diimbangi dengan tata kelola yang baik. Fenomena terkini menunjukkan bahwa krisis integritas dan lemahnya tata kelola menjadi persoalan yang meluas. Berdasarkan laporan *Indonesia Corruption Watch*, sepanjang tahun 2023 terjadi 791 kasus korupsi dana desa dengan total kerugian negara mencapai Rp29,1 triliun, di mana mayoritas pelakunya berasal dari perangkat desa ([Anandya & Ramadhana, 2024](#)). Kondisi ini diperparah oleh peningkatan jumlah Dana Desa dari Rp20,7 triliun tahun 2015 menjadi Rp71 triliun pada tahun 2024, yang tidak diimbangi dengan peningkatan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan. Penelitian oleh ([Permatasari et al., 2024](#)) menemukan di Indonesia masih banyak yang memiliki sistem pelaporan yang lemah, sehingga menyulitkan pengawasan independen. Sementara itu, ([Diansari et al., 2023](#)) menegaskan bahwa integritas aparatur dan efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Menyikapi persoalan tersebut pemerintah menerbitkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menekankan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Namun, implementasinya masih jauh dari harapan, terutama dalam aspek pengawasan dan pelibatan masyarakat. Desa-desanya di Kecamatan Indralaya Utara, misalnya, menghadapi tantangan pengelolaan APBDes secara profesional karena beragamnya kapasitas sumber daya manusia, letak geografis, dan keterbatasan sistem informasi desa. Secara teoritis, pengelolaan keuangan desa yang baik memerlukan keseimbangan antara transparansi dan partisipasi masyarakat. Namun, berbagai studi empiris menunjukkan hasil yang tidak konsisten. ([Tangahu et al., 2023](#)) menyimpulkan transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan APBDes, sedangkan ([Rahmayani & Kurnadi, 2022](#)) menemukan sebaliknya. ([Veronika & Basri, 2023](#)) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, namun ([Fitra et al., 2024](#)) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak signifikan terhadap akuntabilitas.

Berbagai hasil peneliti terdahulu yaitu ketidak konsistenan hasil terkait pengaruh transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Penelitian ([Sakdiyah et al., 2023](#)) menemukan bahwa transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Di sisi lain penelitian ([Yudastio & Azriya, 2022](#)) menyatakan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa, meskipun transparansi tetap berperan penting. Ketidak konsistenan hasil peneliti tersebut diperkuat oleh ([Diansari et al., 2023](#)) bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi adanya dukungan sosial masyarakat. Selain itu ([Ginting et al., 2024](#)) menyoroti bahwa transparansi program dana desa sangat bergantung pada keterlibatan aktif warga dan akses

informasi publik di tingkat lokal. Hal ini mempertegas perlunya penelitian lebih lanjut yang menguji pengaruh kedua variabel ini secara simultan dalam konteks desa yang berbeda.

Menjawab gap tersebut, penelitian ini hadir dengan kebaruan sebagai berikut: (1) fokus pada pengaruh simultan antara transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap Pengelolaan APBDes, (2) menggunakan metode *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) untuk menangkap hubungan laten antar variabel secara lebih akurat, sebagaimana dianjurkan oleh (Hair Jr et al., 2022) dan (3) dilakukan di Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir wilayah yang belum banyak diteliti, namun memiliki karakteristik sosial dan kelembagaan yang kompleks serta tingkat partisipasi masyarakat yang beragam. Melalui pendekatan ini, diharapkan memberikan kontribusi empiris dan kebijakan dalam memperkuat tata kelola keuangan desa yang transparansi dan partisipasi.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Agensi

Teori penelitian ini dapat dijelaskan melalui perspektif teori agensi. Awalnya teori ini dikemukakan oleh Meckling dan Jensen tahun 1976, menggambarkan keterkaitan kerja antara *agent* dan *principal* (Meckling & Jensen, 1976). Penelitian ini menggunakan teori agensi karena dilihat dari sudut pandang *agency theory* dapat menjelaskan hubungan masyarakat dengan pemerintah seperti antara *principal* dan *agent*. Masyarakat mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah desa, dan sebagai bentuk akuntabilitas atas kewenangan tersebut, pemerintah desa berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat (Al Ichsan et al., 2025). Transparansi dan partisipasi menjadi mekanisme kontrol untuk meminimalkan konflik kepentingan dan kesenjangan informasi.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah aspek penting di dalam tata kelola pemerintahan desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Pengelolaan APBDes adalah rencana keuangan tahunan desa dirumuskan dan disepakati bersama antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, lalu disahkan melalui peraturan desa. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Menurut (Utari & Nawangsari, 2023), pengelolaan APBDes yang baik mampu mendorong optimalisasi penggunaan dana desa untuk kepentingan publik. Penelitian tersebut menemukan bahwa desa yang memiliki sistem pengelolaan keuangan yang terbuka serta melibatkan masyarakat secara cenderung lebih efektif dalam mengelola APBDes. Sejalan dengan penelitian (Urdaneta & Sinarwati, 2022), yang menyebutkan bahwa pengelolaan APBDes sangat dipengaruhi oleh kompetensi aparat desa dan sistem informasi keuangan desa yang terintegrasi, serta didukung oleh keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan.

Selanjutnya Penelitian (Diansari et al., 2023) menegaskan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana desa sangat bergantung pada faktor-faktor sosial seperti perilaku prososial aparatur dan budaya organisasi desa. Dalam konteks ini, pengelolaan APBDes tidak hanya dipandang sebagai proses administratif, melainkan juga sebagai cerminan tata kelola yang berorientasi pada pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan APBDes menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan tata kelola desa. Kualitas pengelolaan ini akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat desa, kepercayaan publik terhadap pemerintah desa, serta keberlanjutan program pembangunan desa.

Transparansi

Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai prinsip transparan. Transparansi

menjadi pilar utama dalam pengelolaan keuangan desa. Keterbukaan informasi anggaran memungkinkan masyarakat mengetahui alokasi dan penggunaan dana secara jelas. Penelitian (Sakdiyah et al., 2023) transparansi terbukti berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Pemerintah desa yang menyampaikan informasi secara terbuka mampu meminimalisir kecurigaan publik dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBDes. Transparansi sebagai bentuk keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat untuk memberikan akses informasi terkait pengelolaan dana desa sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah (Mardiasmo, 2018). Upaya untuk meningkatkan pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan dengan membuka akses terhadap semua informasi serta melibatkan masyarakat (Wulandari, 2020). Penelitian (Rahmayani & Kurnadi, 2022) menyatakan Transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap Pengelolaan APBDes di Kecamatan Kadipaten Majalengka. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat keterbukaan informasi yang diberikan oleh pemerintah desa maka semakin baik kualitas pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, transparansi tidak hanya menjadi instrumen kontrol sosial, tetapi juga menjadi indikator penting dalam mewujudkan tatakelola keuangan desa yang efektif dan bertanggungjawab.

Partisipasi Masyarakat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa partisipasi termasuk salah satu prinsip pengelolaan keuangan desa. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk keterlibatan warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan anggaran desa. Partisipasi menekankan bahwa setiap individu berhak terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara tidak langsung maupun langsung (Wulandari, 2020). Keterlibatan masyarakat berperan sebagai penghubung antara kebutuhan warga dengan pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa. Penelitian (Husna et al., 2024) menunjukan Partisipasi Masyarakat memiliki pengaruh terhadap Pengelolaan APBDes Di Desa Tamansatriyan, Kabupaten Malang. Penelitian (Arifin et al., 2024) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan APBDes, terutama dalam aspek pengawasan dan evaluasi penggunaan anggaran. Sementara itu (Anas & Setiyowati, 2021) mengungkap bahwa partisipasi masyarakat juga mampu memoderasi pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa, sehingga partisipasi menjadi elemen penting dalam menciptakan pengelolaan APBDes yang baik.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Transparansi adalah prinsip dasar tata kelola pemerintahan desa yang menuntut keterbukaan informasi, terutama mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan APBDes. Pemerintah desa yang transparan membuka akses informasi bagi masyarakat secara luas, termasuk penggunaan dana dan capaian program. Hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes. Penelitian oleh (Sakdiyah et al., 2023) dan (Rahmayani & Kurnadi, 2022) menunjukkan transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Pemerintah desa menyampaikan informasi secara terbuka mampu menekan praktik penyalahgunaan dana dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan APBDes. Selain itu, transparansi juga berperan sebagai mekanisme kontrol publik yang dapat mendorong efisiensi dan akuntabilitas penggunaan dana publik (Wulandari, 2020). Dengan pertimbangan hasil pemikiran dan peneliti terdahulu, hipotesis yang dirumuskan yaitu:

H1: Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Partisipasi masyarakat adalah salah satu prinsip dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Keterlibatan masyarakat pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan anggaran desa menjadi instrumen penting untuk menciptakan transparansi, efektivitas, dan legitimasi dalam penggunaan dana desa. Penelitian (Husna et al., 2024), (Arifin et al., 2024) dan (Anas & Setiyowati, 2021) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan APBDes, terutama dalam aspek pengawasan dan evaluasi. Partisipasi masyarakat juga mampu memperkuat keterikatan sosial antara pemerintah desa dan warga, serta meningkatkan kualitas kebijakan dan pengalokasian anggaran desa. Dengan pertimbangan hasil pemikiran dan peneliti terdahulu, hipotesis yang dirumuskan yaitu:

H2: Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini yaitu metode kuantitatif yang merupakan pendekatan yang berpijak dari paradigma positivisme, pendekatan ini untuk mengkaji fenomena pada sampel ataupun populasi tertentu dengan menerapkan instrumen penelitian sebagai alat pengumpulan data yang kemudian dianalisis secara kuantitatif menggunakan metode statistik, yang bertujuan menganalisis hasil hipotesis yang sebelumnya ditentukan (Sugiyono, 2019). Penelitian ini dilakukan dengan data primer yang dikumpulkan langsung di 15 desa Kecamatan Indralaya Utara. Pendekatan ini sesuai digunakan dalam penelitian akuntansi publik karena memungkinkan pengujian model yang kompleks dan pengambilan kesimpulan berbasis data (Hair Jr et al., 2022).

Populasi dan Sampel

Penelitian ini menerapkan teknik sampling jenuh, yaitu melibatkan seluruh anggota populasi sebagai responden karena jumlah populasi yang relatif kecil dan dapat dijangkau sepenuhnya. Total populasi sebanyak 15 desa di Kecamatan Indralaya Utara dijadikan lokasi penelitian, dengan jumlah total sampel sebanyak 90 responden. Pemilihan responden mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam aktivitas pengelolaan dan pengawasan APBDes. Oleh karena itu, responden dibagi menjadi dua kategori utama: (1) Perangkat desa (kepala desa, sekretaris desa dan Bendahara desa) mewakili sisi transparansi, karena mereka bertanggung jawab dalam pelaporan dan pengelolaan dana desa, (2) Masyarakat desa (tokoh masyarakat, anggota BPD, dan warga aktif mewakili aspek partisipasi masyarakat, karena mereka terlibat dalam musyawarah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.

Tabel 1. Sampel Penelitian

Kategori Responden	Jumlah Desa	Responden per Desa	Total Responden
Perangkat Desa	15 Desa	3 Orang	45 Orang
Masyarakat Desa	15 Desa	3 Orang	45 Orang
Total			90 Orang

Sumber: Data Diolah, 2025

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian menerapkan teknik pengumpulan data dengan kuesioner yang digunakan untuk proses pengumpulan informasi terkait pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk memperoleh jawaban atas informasi yang dibutuhkan. Skala yang digunakan dalam merubah data kualitatif menjadi data kuantitatif yaitu skala lima tingkatan (*Likert-type*) 1-5 yang menghasilkan

data interval (Cooper & Schindler, 2017). Skala yang digunakan untuk mengukur respons dalam pengujian variabel independen dan dependen terdiri atas lima tingkatan 1-5. Berikut adalah definisi operasional yang digunakan sebagai indikator dalam kuesioner:

Tabel 2. Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Transparansi (X ₁)	Transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses berbagai informasi tentang pengelolaan dana desa, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah tersebut. (Mardiasmo, 2018).	1. Informatif 2. Keterbukaan 3. Pengungkapan	Interval
Partisipasi Masyarakat (X ₂)	Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan bersosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Mardiasmo, 2018)	1. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan program-program desa 2. Mengusulkan rencana anggaran 3. Terlibat dalam rapat paripurna 4. Terlibat mengawasi dan melaporkan 5. Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran 6. Memberikan penghargaan	Interval
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Y)	Pengelolaan adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014)	1. Tahap perencanaan 2. Tahap pelaksanaan 3. Tahap penatausahaan 4. Tahap pelaporan 5. Tahap pertanggung jawaban	Interval

Sumber: Data Diolah, 2025

Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis persamaan struktural berbasis variance yaitu *Partial Least Square Structural Equation Modeling* dengan dukungan software SmartPLS versi 4.0.9. Menurut (Winarso & Jufriyanto, 2019) evaluasi model dilakukan melalui dua tahap, yaitu *outer model* untuk mengukur validitas dan reliabilitas konstruk melalui uji *convergent validity*,

discriminant validity, *composite reliability*, dan *Cronbach's Alpha*, serta *inner model* untuk menilai keterkaitan antara variabel laten dari pengujian *R-Square* dan *Goodness of Fit*.

HASIL

Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini penting guna memberikan gambaran umum mengenai latar belakang individu yang terlibat dalam pengisian kuesioner. Informasi ini berfungsi sebagai dasar dalam menganalisis data lebih lanjut serta membantu dalam memahami konteks jawaban yang diberikan. Jumlah responden penelitian ini yaitu 90 orang, yang tersebar di 15 desa disajikan berikut ini:

Tabel 3. Karakteristik Responden

No	Kategori	Sub Kategori	Jumlah (orang)	Presentase
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	45	50%
		Perempuan	45	50%
		Total	90	100%
2	Usia	21-25 Tahun	23	26%
		26-30 Tahun	11	12%
		31-35 Tahun	8	9%
		36-40 Tahun	10	11%
		41-45 Tahun	16	18%
		> 45 Tahun	22	24%
		Total	90	100%
3	Tingkat Pendidikan	SMP/MTS	3	3%
		SMA/SMK/MAN	57	63%
		Diploma III	2	2%
		Diploma IV/S1	26	29%
		S2	2	2%
		S3	-	0%
		Total	90	100%
4	Jabatan	Kepala Desa	15	17%
		Sekretaris Desa	15	17%
		Bendahara Desa	15	17%
		Masyarakat Desa	45	50%
		Total	90	100%

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa responden terbagi seimbang antara laki-laki dan perempuan, mayoritas berusia 21–25 tahun, serta sebagian besar berpendidikan SMA/SMK/MAN. 50% dari responden berasal dari masyarakat desa dan 50% adalah perangkat desa. Penyebaran responden yang seimbang antara perangkat desa dan masyarakat, dengan variasi usia dan pendidikan, membuat hasil penelitian ini cukup mewakili kondisi sebenarnya di lapangan. Dengan begitu, temuan penelitian dapat dipercaya dan bermanfaat sebagai dasar untuk memperbaiki transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan APBDes di desa.

Statistik Deskriptif

Tabel 4. Hasil Statistik Deskriptif

<i>Indicator</i>	<i>N</i>	<i>Mean</i>	<i>Scale min</i>	<i>Scale max</i>	<i>Standard Deviation</i>
Transparansi (X¹)					
1	90	4.578	2.000	5.000	0,517361
2	90	4.556	2.000	5.000	0,475694
3	90	4.522	1.000	5.000	0,529861
4	90	4.467	1.000	5.000	0,55
5	90	4.622	1.000	5.000	0,572222
6	90	4.444	1.000	5.000	0,630556
Partisipasi Masyarakat (X²)					
19	90	4.544	2.000	5.000	0,440972
20	90	4.367	2.000	5.000	0,511806
21	90	4.456	2.000	5.000	0,509028
22	90	4.411	2.000	5.000	0,546528
23	90	4.367	1.000	5.000	0,511806
24	90	4.300	1.000	5.000	0,598611
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Y)					
25	90	4.744	3.000	5.000	0,352083
26	90	4.678	1.000	5.000	0,461111
27	90	4.678	2.000	5.000	0,398611
28	90	4.678	2.000	5.000	0,398611
29	90	4.656	2.000	5.000	0,429167
30	90	4.667	3.000	5.000	0,358333

Sumber: Output SmartPLS 4.0.9

Berdasarkan hasil analisis tabel diatas, variabel Transparansi memiliki rata-rata antara 4,444 hingga 4,622, menunjukkan tingkat keterbukaan informasi pengelolaan keuangan desa yang dinilai tinggi oleh responden. Variabel Partisipasi Masyarakat memiliki rata-rata antara 4,300 hingga 4,544, yang mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan APBDes berada pada kategori tinggi. Sementara itu, variabel Pengelolaan APBDes memperoleh nilai rata-rata tertinggi, yaitu 4,656 hingga 4,744, yang menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran desa dinilai sangat baik. Seluruh variabel memiliki standar deviasi relatif kecil, sehingga persepsi responden cenderung konsisten.

Nilai rata-rata yang tinggi pada ketiga variabel menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi positif terhadap transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan APBDes. Hal ini menunjukkan tata kelola keuangan desa di wilayah penelitian telah berjalan dengan baik, ditandai oleh keterbukaan informasi, keterlibatan aktif masyarakat, dan manajemen anggaran yang efektif. Standar deviasi yang rendah menunjukkan konsistensi persepsi responden, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah desa untuk mempertahankan dan meningkatkan praktik-praktik tata kelola yang sudah baik tersebut. Selain itu, kondisi ini memperkuat dugaan bahwa hubungan antarvariabel yang diuji pada tahap analisis inferensial memiliki potensi signifikansi yang tinggi, sehingga mendukung kelayakan model penelitian yang digunakan.

Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Evaluasi model pengukuran digunakan untuk melihat indikator-indikator dalam penelitian yang valid dan reliabel untuk mengukur konstruk laten (Ghozali & Latan, 2015). Pendekatan ini terdapat tiga aspek utama yang dianalisis, yaitu Convergent Validity, Discriminant Validity, dan Composite Reliability.

Convergent Validity

Convergent validity dinilai menggunakan dua ukuran utama, yaitu *Outer Loading* dan AVE. Menurut (Ghozali & Latan, 2015). Indikator yang memiliki validitas konvergen baik, jika memiliki nilai *loading* >0,70 dan AVE yang baik adalah >0,50 artinya konstruk dapat menjelaskan setidaknya 50% *varians* dari indikator-indikatornya.

Tabel 5. Outer Loading

Variabel	Indikator	Outer Loading	AVE	Ket
Transparansi	X1.1	0,911	0,744	Valid
	X1.2	0,899		Valid
	X1.3	0,817		Valid
	X1.4	0,803		Valid
	X1.5	0,857		Valid
	X1.6	0,881		Valid
Partisipasi Masyarakat	X2.1	0,790	0,679	Valid
	X2.2	0,880		Valid
	X2.3	0,850		Valid
	X2.4	0,916		Valid
	X2.5	0,747		Valid
	X2.6	0,744		Valid
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	Y1	0,837	0,711	Valid
	Y2	0,852		Valid
	Y3	0,858		Valid
	Y4	0,797		Valid
	Y5	0,878		Valid
	Y6	0,836		Valid

Sumber: Ouput SmartPLS 4.0.9, 2025

Hasil analisis *convergent validity* menggunakan *Outer Loading* dan AVE, seluruh indikator variabel Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Pengelolaan APBDes menunjukkan validitas konvergen yang baik. Semua nilai pada *outer loading* >0,70 dan AVE masing-masing konstruk >0,50, berarti setiap konstruk memiliki kemampuan menjelaskan >50% *varians* indikator-indikatornya, maka seluruh indikator dalam model dinyatakan layak dan valid digunakan untuk analisis berikutnya.

Discriminant Validity

Discriminant Validity berdasarkan nilai AVE masing-masing konstruk pada model pengukuran ini ditetapkan melalui penggunaan indikator reflektif (Suhanta et al., 2022). Masing-masing indikator harus sesuai dengan syarat yaitu > 0,50 untuk dianggap valid/benar dan memiliki nilai yang tinggi untuk Validitas Diskriminan. Validitas diskriminan dilihat dari hasil *Fornell-Larcker Criterion* dan *Cross Loading*. Uji *Fornell-Larcker* diketahui setiap variabel memiliki korelasi yang lebih kuat daripada konstraknya sendiri jika dibandingkan konstruk lainnya.

Tabel 6. Fornell-Larcker Criterion

	Transparansi	Partisipasi Masyarakat	Pengelolaan APBDes
Transparansi	0,862		
Partisipasi Masyarakat	0,755	0,824	
Pengelolaan APBDes	0,800	0,748	0,843

Sumber: Ouput SmartPLS 4.0.9, 2025

Berdasarkan hasil *Cronbach's Alpha*, *Composite Reliability*, dan *AVE*, diketahui bahwa dalam penelitian ini seluruh konstruk yaitu Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Pengelolaan APBDes memiliki reliabilitas dan validitas yang sangat baik. *Cronbach's Alpha* >0,80 dan *Composite Reliability* >0,70 menunjukkan konsistensi internal dan keandalan instrumen, sementara *AVE* di atas 0,60 mengindikasikan terpenuhinya validitas konvergengendang dan dapat diketahui bahwa semua konstruk dalam model ini layak dan valid untuk digunakan dalam analisis model struktural selanjutnya (Nurhalizah, 2023). Setelah mengetahui nilai *Fornell-Larcker Criterion*, selanjutnya yakni mengevaluasi nilai *Cross Loading*, bertujuan untuk mengetahui sebrapa jauh indikator mempunyai korelasi paling tinggi dari variabel (konstruk) yang diukurnya dibandingkan dengan konstruk lain (Pariesti & Christa, 2022) dilihat dari tabel berikut:

Tabel 7. Cross Loading

	Transparansi	Partisipasi Masyarakat	Pengelolaan ABPDes
X1.1	0,911	0,713	0,784
X1.2	0,899	0,651	0,691
X1.3	0,817	0,661	0,646
X1.4	0,803	0,610	0,568
X1.5	0,857	0,632	0,699
X1.6	0,881	0,637	0,725
X2.1	0,636	0,790	0,636
X2.2	0,674	0,880	0,613
X2.3	0,665	0,850	0,666
X2.4	0,659	0,916	0,725
X2.5	0,425	0,747	0,429
X2.6	0,627	0,744	0,566
Y1	0,679	0,644	0,838
Y2	0,722	0,675	0,855
Y3	0,672	0,595	0,860
Y4	0,703	0,633	0,791
Y5	0,690	0,639	0,878
Y6	0,561	0,587	0,834

Sumber: Ouput SmartPLS 4.0.9, 2025

Berdasarkan tabel tersebut seluruh indikator mempunyai nilai *loading* yang tinggi dari konstruk yang diukurnya masing-masing dibandingkan loading pada konstruk lain. Berdasarkan nilai *Cross Loading*, sebuah indikator dikatakan valid secara diskriminan apabila nilai loadingnya terhadap konstruk asal lebih tinggi secara signifikan daripada loadingnya terhadap konstruk yang lainnya (Ghozali & Latan, 2015) maka, model pengukuran (*Outer Model*) dinyatakan valid secara diskriminan dan layak digunakan untuk analisis model struktural selanjutnya.

Composite Reliability

Composite Reliability adalah ukuran yang dipakai dalam menguji reliabilitas konstruk laten dalam model pengukuran dan mempertimbangkan loading masing-masing indikator terhadap konstruknya. Menurut (Hair Jr et al., 2022) *Composite Reliability* dikatakan baik jika $>0,70$. Namun, untuk penelitian eksploratif, antara nilai $0,60-0,70$ masih dianggap wajar. Pengujian Reliabilitas dilihat dari *Cronbach's Alpha* sebagai standar minimum serta *Composite Reliability* mengukur konsistensi konstruk secara keseluruhan.

Tabel 5. Uji Reliabilitas

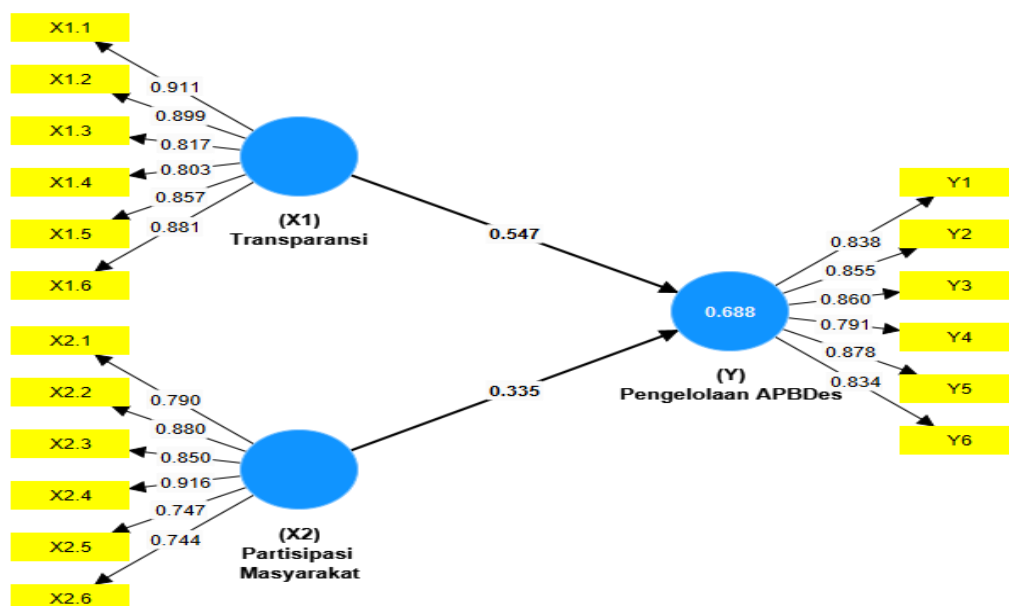
	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability (rho_a)</i>	<i>Composite Reliability (rho_c)</i>	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
Transparansi	0,931	0,937	0,946	0,744
Partisipasi Masyarakat	0,904	0,917	0,926	0,679
Pengelolaan APBDes	0,919	0,920	0,936	0,711

Sumber: Ouput SmartPLS 4.0.9, 2025

Berdasarkan hasil pengujian terhadap *Cronbach's Alpha*, *Composite Reliability*, dan AVE, maka ditarik kesimpulan bahwa dalam penelitian seluruh konstruk yaitu Transparansi dan Partisipasi Masyarakat, dan Pengelolaan APBDes memiliki reliabilitas dan validitas yang sangat baik. *Cronbach's Alpha* $>0,80$ dan *Composite Reliability* $>0,70$ menunjukkan konsistensi internal serta keandalan instrumen, sementara AVE di atas $0,60$ mengindikasikan terpenuhinya validitas konvergen dengan begitu disimpulkan bahwa, semua konstruk dalam model ini layak dan valid untuk dipakai dalam analisis model struktural berikutnya.

Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Model pengukuran menggambarkan keterkaitan variabel laten dengan indikatornya (Juliandi, 2018). Berikut hasil *bootstrapping* yang digunakan untuk menilai signifikansi statistik dari hubungan tersebut, dengan menampilkan nilai t-statistik dan p-value sebagai dasar dalam menguji kekuatan serta reliabilitas antar konstruk:



Gambar 1. Model Struktural

Sumber: Ouput SmartPLS 4.0.9, 2025

Hasil yang disajikan pada gambar 1 merupakan keluaran asli (*output*) dari analisis menggunakan SmartPLS 4.0.9 berdasarkan data primer yang dikumpulkan dari 90 responden. Seluruh nilai *path coefficient*, *t-statistics*, dan *p-values* ditampilkan sebagaimana adanya tanpa dilakukan perubahan atau penyesuaian untuk menyesuaikan hipotesis. Penyajian hasil analisis ini dimaksudkan untuk menjaga objektivitas dan memastikan bahwa temuan penelitian merefleksikan kondisi sebenarnya di lapangan.

R-Square (R^2)

R-Square menjadi alat ukur statistik dalam analisis regresi yang menggambarkan sejauh mana *proporsi varians* dari variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen dalam *Inner Model*. Menurut (Chin, 1998) kriteria nilai untuk variabel laten dependen adalah 0,66, 0,33, 0,19 yang artinya dapat dikatakan berpengaruh tinggi, sedang dan rendah dilihat dari tabel berikut:

Tabel 6. *R-Square*

	<i>R-Square</i>
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	0,688

Sumber: Ouput SmartPLS 4.0.9, 2025

Berdasarkan nilai *R-Square* (R^2) 0,688 pada variabel Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dapat disimpulkan bahwa sebesar 68,8% variabilitas dalam Pengelolaan APBDes dapat dijelaskan pada variabel-variabel independen dan sisa 31,2%, dijelaskan faktor lainnya selain model ini.

Goodness of Fit

Goodness of Fit yaitu ukuran keseluruhan yang digunakan untuk melihat kecocokan model penelitian yang dibangun dari data yang digunakan (Zaelani et al., 2020). Menurut (Wetzels et al., 2009) interpretasi nilai GoF yaitu 0,1 dinyatakan rendah, 0,25 sedang, 0,36 tinggi. Semakin tingginya nilai GoF, maka semakin baik model secara keseluruhan dalam menjelaskan hubungan antar konstruk serta kecocokan antara data dan model.

Tabel 7. *Goodness of Fit*

	<i>Saturated Model</i>	<i>Estimated Model</i>
SRMR	0,075	0,075
d_ ULS	0,972	0,972
d_ G	0,955	0,955
Chi-Square	415,575	415,575
NFI	0,747	0,747

Sumber: Ouput SmartPLS 4.0.9, 2025

Nilai *Goodness of Fit*, diketahui bahwa nilai SRMR 0,075 di bawah batas minimum 0,10. Artinya model tingkat kesalahan residual masih dapat diterima, sehingga model dikatakan memiliki fit yang baik secara absolut (Haryono & Wardoyo, 2012). *Normed Fit Index* (NFI) 0,747 juga menunjukkan tingkat kecocokan model yang cukup, meskipun belum mencapai nilai ideal ($\geq 0,90$), namun masih dapat diterima dalam penelitian eksploratori. Menurut (Nishom, 2019), nilai d_ ULS dan d_ G menunjukkan kedekatan antara model empiris dan model estimasi, sementara nilai *Chi-square* yang besar masih dianggap wajar karena dipengaruhi oleh ukuran sampel maka dari itu, model ini layak digunakan untuk uji struktur berikutnya.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis ini melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui *path analysis* (Kurnianto & Kharisudin, 2022). Pengujian hipotesis ini dilihat dari uji *bootstapping* nilai yang digunakan adalah nilai dari *Path Coefficient* untuk melihat variabel

berpengaruh positif atau negatif yakni antara rentang nilai -1 sampai dengan 1 dengan tolak ukur nilai *t-statistic* >1,96 dan *p-value* <0,05 (Yamin, 2021). Jika kriteria yang ditentukan terpenuhi, maka hipotesis dinyatakan signifikan dan diterima.

Tabel 8. Uji Hipotesis

	Path Coefficient	T- Statistics	P-Values	Ket
Transparansi-> Pengelolaan APBDes	0,547	5,889	0,000	Berpengaruh positif dan signifikan
Partisipasi Masyarakat -> Pengelolaan APBDes	0,335	3,860	0,000	Berpengaruh positif dan signifikan

Sumber: Ouput SmartPLS 4.0.9, 2025

Berdasarkan uji hipotesis tersebut, bahwa seluruh variabel Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Pengelolaan APBDes. Dilihat dari *Path Coefficient* yang seluruhnya positif serta *t-statistics* yang >1,96 dan *p-values* yang <0,05. Hubungan antara Transparansi dengan Pengelolaan APBDes dibuktikan melalui *Path Coefficient* 0,547, *T-Statistic* 5,889 serta *P-Value* 0,000 yang menunjukkan hubungan antara variabel transparansi dan Pengelolaan APBDes signifikan secara statistik.

PEMBAHASAN

Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Variabel Transparansi berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap Pengelolaan APBDes. Hal ini menunjukkan bahwa, tingginya tingkat transparansi terhadap penyelenggaraan pengelolaan desa, maka akan semakin baik proses pengelolaan keuangannya. Berdasarkan tabel diatas secara statistik hipotesis yang menyatakan H₁: Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan APBDes diterima. Hasil ini mendukung Teori Agensi yang menjelaskan bahwa adanya keterbukaan informasi dapat mengurangi asimetri informasi antara prinsipal (masyarakat) dan agen (pemerintah desa) sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pengelolaan keuangan (Meckling & Jensen, 1976). Dengan transparansi yang baik, masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana, sehingga potensi penyalahgunaan berkurang dan kualitas pengelolaan APBDes juga akan meningkat.

Penelitian ini menunjukkan kesamaan dengan penelitian (Rahmayani & Kurnadi, 2022) menunjukkan Transparansi juga berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan APBDes, penelitian oleh (Lestari et al., 2023) juga menyatakan Transparansi Informasi berpengaruh positif terhadap efektifitas pengelolaan keuangan desa dan hasil penelitian oleh (Mualifu et al., 2019) menyatakan Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Meskipun demikian, bertentangan dengan penelitian (Tangahu et al., 2023) dimana Transparansi berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Pengelolaan APBDes. Perbedaan ini menandakan bahwa konteks lokal, metode penelitian, dan partisipasi masyarakat dapat memengaruhi signifikansi hubungan antara transparansi dan Pengelolaan APBDes.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Variabel Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan APBDes. Pengaruh yang ditimbulkan signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan yang cukup tinggi. sehingga secara statistik hipotesis yang menyatakan H₂: Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Pengelolaan APBDes diterima. Hasil dari penelitian ini juga menguatkan pandangan bahwa partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam Pengelolaan APBDes dan mendukung Teori Agensi, yang menyatakan bahwa keterlibatan aktif masyarakat sebagai prinsipal dalam pengawasan terhadap agent (pemerintah desa) dapat mengurangi asimetri informasi serta mendorong akuntabilitas serta efektivitas pengelolaan keuangan desa (Meckling & Jensen, 1976).

Hasil ini mendukung penelitian (Husna et al., 2024) dan (Hulu & Rahim, 2022) yang mengungkapkan Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Pengelolaan APBDes. Penelitian lain oleh (Gunawan, 2023) dan penelitian (Kusuma et al., 2025) juga mengungkapkan terdapat pengaruh yang positif dan juga signifikan variabel Partisipasi Masyarakat terhadap Transparansi Pengelolaan APBDes. Bertentangan dengan penelitian (Puspitasari et al., 2023) menyatakan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan APBDes tidak terdapat pengaruh. Perbedaan tersebut kemungkinan disebabkan dari perbedaan konteks geografis, tingkat partisipasi masyarakat, serta pendekatan yang digunakan dalam mengukur partisipasi dan efektivitas pengelolaan anggaran desa (Putra, 2018). Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan Pengelolaan APBDes dapat semakin ditingkatkan apabila partisipasi masyarakat dikelola secara optimal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transparansi dan juga partisipasi dari masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan APBDes di Kecamatan Indralaya Utara. Semakin terbuka informasi keuangan desa, semakin tinggi pula kepercayaan publik dan semakin kecil potensi penyimpangan anggaran. Keterlibatan masyarakat dari tahap perencanaan hingga evaluasi turut meningkatkan keadilan, efektivitas, dan responsivitas penggunaan anggaran desa. Kedua variabel tersebut saling melengkapi dalam menciptakan tata kelola APBDes yang lebih akuntabel dan partisipatif. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memperkuat mekanisme transparansi dan memperluas ruang partisipasi warga dalam setiap proses pengelolaan keuangan desa. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan pada lingkup wilayah yang hanya mencakup Kecamatan Indralaya Utara dengan jumlah responden yang relatif terbatas, sehingga hasil penelitian ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi di wilayah lain.

SARAN

1. Saran Praktis: Pemerintah Desa di Kecamatan Indralaya Utara disarankan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan keterbukaan informasi tentang keuangan desa serta partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan APBDes. Hal ini dapat dilakukan dari terlibatnya masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pengawasan anggaran, serta menyusun laporan yang terbuka dan mudah diakses. Aspirasi masyarakat hendaknya dijadikan acuan utama dalam perencanaan pembangunan, dan direalisasikan secara nyata melalui kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pemerintah desa juga diharapkan mengelola APBDes secara terbuka, jujur, efisien, efektif, adil, serta dapat dipertanggungjawabkan guna mewujudkan tatakelola keuangan desa yang baik dan berintegritas.
2. Saran Teoritis: Penelitian ini memiliki keterbatasan wilayah karena hanya dilakukan di Kecamatan Indralaya Utara. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman dan hasil yang lebih luas dan melihat perbedaan konteks antar wilayah dan dapat memperluas lokasi penelitian ke daerah lain. Dengan demikian, hasil yang diperoleh akan lebih kaya dalam menggambarkan dinamika pengelolaan APBDes di berbagai kondisi dan karakteristik wilayah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis berterimakasih untuk banyak pihak yang mendukung dan berkontribusi menyusun jurnal ini. Terkhusus untuk kedua orang tua yang mendoakan dan memberi semangat untuk penulis dan mengucapkan terimakasih kepada kedua dosen pembimbing untuk arahan, masukan, serta motivasi yang sangat membantu selama pelaksanaan penelitian ini. Penulis turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Desa dan masyarakat di Kecamatan Indralaya Utara yang telah memberikan data, informasi, serta waktu untuk mendukung kelancaran pengumpulan data di lapangan. Penulis juga mengucapkan terimakasih untuk keluarga dan teman-teman yang telah

memberikan apresiasi, serta dukungan moral selama penyusunan jurnal. Semoga jurnal ini kelak memberikan kontribusi ilmiah dan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam aspek pengelolaan keuangan desa yang baik.

REFERENSI

- Al Ichsan, N. H., Mashuri, M., & Ariesta, W. (2025). Analisa Yuridis Mengenai Kewajiban Pemerintah Desa Dalam Menyampaikan Informasi Laporan Keuangan Desa Kepada Publik Berdasarkan Asas Transparansi Dan Akuntabilitas. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2289–2303. <https://doi.org/http://shariajournal.com/index.php/IJJEL/article/view/1261>.
- Anandya, D., & Ramadhana, K. (2024). Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023. *Indonesia Corruption Watch*, 1–51. <https://doi.org/https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2023>
- Anas, D. E. A. F., & Setiyowati, S. W. (2021). Partisipasi Membentuk Hubungan Antara Aspek Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 7(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jiap.v7i2.26833>
- Arifin, N., Junita, A., & Kahfi, N. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang). <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/optimal.v4i1.2585>
- Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. *Modern Methods for Business Research*, 295(2), 295–336. <file:///C:/Users/user/Downloads/1998ThePartialLeastSquaresApproachtoSEMchapter.pdf>
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2017). *Metode Penelitian Bisnis Edisi 12 Buku 2*.
- Diansari, R. E., Musah, A. A., & Binti Othman, J. (2023). Factors affecting village fund management accountability in Indonesia: The moderating role of prosocial behaviour. *Cogent Business & Management*, 10(2), 2219424. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2219424>
- Fitra, H., Syofyan, E., Masdupi, E., Mulyani, E., Taqwa, S., & Halmawati, H. (2024). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(2), 1526–1535. <http://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v8i2.1906>
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Partial least squares konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program smartpls 3.0 untuk penelitian empiris. *Semarang: Badan Penerbit UNDIP*, 4(1), 35–46.
- Ginting, A. H., Widianingsih, I., Mulyawan, R., & Nurasa, H. (2024). Village fund program in Cibeureum and Sukapura village, Bandung Regency, Indonesia: Problems, risks, and solutions. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2303452. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2303452>
- Gunawan, A. (2023). PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa). *Jurnal Ilmu Manajemen Retail Universitas Muhammadiyah Sukabumi*, 4(2), 93–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.37150/jimat.v4i2.2517>
- Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., & Ray, S. (2022). *Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) using R: A workbook*. Springer Nature. <https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/51463>
- Haryono, S., & Wardoyo, P. (2012). Structural equation modeling. *Bekasi: PT Intermedia Personalia Utama*. http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/2485/E_BOOK_SEM_DENGAN_AMOS_18.pdf?sequence=8

- Hulu, F., & Rahim, R. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Hilina'a Kecamatan Gunungsitoli. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6), 2312–2320. <https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i6.1096>
- Husna, F. L., Wahono, B., & Novianto, A. S. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tamansatriyan, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. *E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen*, 13(01), 3997–4004. <https://doi.org/https://jim.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/25551>
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa: Studi pada desa Karangsari Kecamatan Sukodono. *ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 1(2), 29–46. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.30741/assets.v1i2.28>
- Juliandi, A. (2018). Structural Equation Model Partial Least Square (Sem-PLS) Dengan SmartPLS. *Modul Pelatihan*, 1(4), 1–6. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/60950176/Modul_SEM-PLS20191019-80871-qxsi41-libre.pdf?1571479920=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DSTRUCTURAL_EQUATION_MODEL_PARTIAL_LEAST.pdf&Expires=1751903365&Signature=EkQiCydOo0RJT2jMzhzZLh68CnJZ
- Kurnianto, D., & Kharisudin, I. (2022). Analisis jalur pengaruh motivasi kerja, disiplin kerja, kepuasan kerja, lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dengan variabel intervening organizational citizenship behavior. *PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika*, 5, 740–751. <https://doi.org/https://journal.unnes.ac.id/sju/prisma/article/view/54614>
- Kusuma, M. W. H., Afifi, M., & Manan, A. (2025). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Sukaraja Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Konstanta*, 4(1), 143–161. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/konstanta.v4i1.1849>
- Lestari, S. A., Arifin, K. Z., & Armaini, R. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Transparansi Informasi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(5), 1745–1752.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Terbaru). Andi.
- Meckling, W. H., & Jensen, M. C. (1976). Theory of the Firm. *Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*, 3(4), 305–360. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-94-009-9257-3_8
- Mualifu, M., Guspul, A., & Hermawan, H. (2019). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemernitah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 1(1), 49–59.
- Nishom, M. (2019). Perbandingan akurasi euclidean distance, minkowski distance, dan manhattan distance pada algoritma K-Means clustering berbasis Chi-Square. *Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT*, 4(1), 20–24. <https://doi.org/http://ejournal.poltekharber.ac.id/index.php/informatika/article/view/1253>
- Nurhalizah, S. (2023). *Analisis Structural Equation Modeling Partial Least Square Pada Kinerja Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jambi*. Fakultas Sains Dan Teknologi. <https://repository.unja.ac.id/56088/>
- Pariesti, A., & Christa, U. R. (2022). Pengaruh kompetensi dan gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai dengan motivasi sebagai variabel intervening pada Kantor Inspektorat Kabupaten Katingan. *Journal of Environment and Management*, 3(1), 35–45. <https://doi.org/https://e-journal.upr.ac.id/index.php/jem/article/view/4284>

- Permatasari, P., Budiarto, A., Dartanto, T., Samosir, A. P., Saputro, B., Ekayana, D., Agustono, E. D., Alim, T. E., Hartono, L., & Wahyuputri, F. W. (2024). Village fund management and reporting systems: are they accountable? *Transforming Government: People, Process and Policy*, 18(4), 512–528. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/TG-07-2023-0098>
- Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Puspitasari, R. L., Astuti, D. D., & Ningsih, W. F. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Efektivitas Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Moderasi Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(1), 121–134. <https://doi.org/https://doi.org/10.31967/riemba.v1i1.941>
- Putra, H. (2018). Tingkat partisipasi masyarakat transmigran dan masyarakat lokal dalam pengembangan wilayah pedesaan di kabupaten luwu timur (studi kasus: desa bawalipu kecamatan wotu). *Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*. <https://doi.org/https://core.ac.uk/download/pdf/198227149.pdf>
- Rahmayani, M. W., & Kurnadi, E. (2022). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi pada Seluruh Desa di Kecamatan Kadipaten). *Entrepreneur: Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan*, 3(2), 703–713.
- Sakdiyah, L. R., Rani, U., & Bharata, R. W. (2023). The Influence of Accountability, Transparency, Community Participation and the Village Financial System on the Effectiveness of Village Fund Management. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(3), 503–514. <https://doi.org/https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i3.1635>
- Sugiyono, P. D. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (M. Dr. Ir. Sutopo. S. Pd. ALFABETA, Cv.
- Suhanta, B., Jufrizen, J., & Pasaribu, F. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Pegawai yang Dimoderasi Lingkungan Kerja. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 5(2), 1396–1412. <https://doi.org/https://stiealwashliyahsibolga.ac.id/jurnal/index.php/jesya/article/view/736>
- Tangahu, W. S., Blongkod, H., & Pakaya, L. (2023). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(1), 839–849. <https://doi.org/https://doi.org/10.37531/sejaman.v6i1.4061>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Urdaneta, G. H. D., & Sinarwati, N. K. (2022). Analisis Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)(Studi Pada Desa Lemukih Buleleng). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 13(3), 756–766. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/view/37312>
- Utari, C. W., & Nawangsari, E. R. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan APBDes Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2022. *Irpia: Jurnal Ilmiah Riset Dan Pengembangan*, 19–30. <https://doi.org/10.71040/irpia.v8i7.235>
- Veronika, Y., & Basri, Y. M. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 19(2), 91–105. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v19i2.109>
- Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. *MIS Quarterly*, 177–195. <https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/20650284>

- Winarso, K., & Jufriyanto, M. (2019). Analisis Kualitas Pelayanan Internet Indihome Pada Pt. X Dengan Pendekatan Part Least Square. *Matrik: Jurnal Manajemen Dan Teknik Industri Produksi*, 20(1), 77–87.
<https://doi.org/https://journal.umg.ac.id/index.php/matriks/article/view/1017>
- Wulandari, I. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Wringin Kecamatan Wringin Bondowoso. *Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*.
https://doi.org/https://digilib.uinkhas.ac.id/12704/1/IKA%20WULANDARI_E20163001.pdf
- Yamin, S. (2021). *Smartpls 3, amos & stata: Olah data statistik (mudah & praktis)* (Vol. 1). Dewangga Energi Internasional Publishing.
<https://books.google.co.id/books?id=7wFAEAAAQBAJ&lpg=PP1&ots=FfFhJVxVcQ&dq=uji bootstapping nilai yang digunakan adalah nilai dari Path Coefficient untuk melihat variabel berpengaruh positif atau negatif &lr&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false>
- Yudastio, Y., & Azriya, N. (2022). Accountability, Transparency, and Participation in Village Fund Management. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.28997>
- Zaelani, A. U., Husain, T., & Budiyantera, A. (2020). Analisis Simulasi Sistem Penunjang Keputusan: Model Matematis Dengan Pendekatan Goodness-of Fit Berbasis Structural Equation Model. *Smartics Journal*, 6(1), 10–16.
<https://doi.org/https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jst/article/view/4157>